

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi seringkali digunakan sebagai indikator kemajuan perekonomian secara agregat (Nuraini, 2017). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2002). Tingkat perkembangan ekonomi ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah diantaranya kegiatan ekonomi produksi, distribusi dan konsumsi. Kondisi tersebut terjadi diberbagai daerah di Indonesia, salah satunya Provinsi Jawa Timur.

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. PDRB merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2007). PDRB juga merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2023 secara kumulatif (c-to-c) tercatat sebesar 4,95 persen. Angka ini menunjukkan tren melambat, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya. Padahal, sebelum adanya pandemi Covid-19, ekonomi Jawa Timur tidak pernah tumbuh di bawah 5 persen terutama tahun 2017 sampai dengan 2019. Setelah pandemi, ekonomi Jawa Timur mulai pulih hingga sempat kembali di atas 5 persen pada tahun 2022. Perkembangan ini dapat di lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Poduk Domestik Bruto Regional (PDRB) atas dasar harga konstan dan Perumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Tahun	Atas Dasar Konstan	
	PDRB (Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2	3
2021	1.668.754,36	3,56
2022	1.757.874,93	5,34
2023	1.844.808,67	4,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilihat bahwa perkembangan pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan menunjukkan adanya tren laju pertumbuhan yang mulai menurun. Tahun 2020 ekonomi Jawa Timur terkena pandemi Covid-19 sehingga kontraksi atau minus 2,33 persen. Tahun 2021 peningkatan terjadi sebanyak 1,23 persen dan langsung melompat sebesar 5,34 persen di tahun 2022. Akan tetapi tahun 2023 kembali di bawah 5 persen yaitu 4,95 persen, yang menyebabkan perlambatan mulai terjadi pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dari tahun 2017 sampai dengan 2023 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi menjadi 4,67 persen.

Tabel 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur

Nama Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur	Laju Pertumbuhan Ekonomi		
	2021	2022	2023
Kabupaten Pacitan	2.49	5.54	4.46
Kabupaten Ponorogo	3.19	3.24	5.14
Kabupaten Trenggalek	3.65	4.52	4.92
Kabupaten Tulungagung	3.53	5.22	4.91
Kabupaten Blitar	3.02	5.20	4.45
Kabupaten Kediri	3.06	4.90	4.53
Kabupaten Malang	3.12	5.13	5.00
Kabupaten Lumajang	3.14	4.43	5.00
Kabupaten Jember	4.00	4.53	4.93
Kabupaten Banyuwangi	4.08	4.43	5.03
Kabupaten Bondowoso	3.49	3.51	4.62
Kabupaten Situbondo	3.26	4.39	4.90
Kabupaten Probolinggo	3.35	4.52	4.73
Kabupaten Pasuruan	4.34	5.32	5.21
Kabupaten Sidoarjo	4.21	7.53	6.16
Kabupaten Mojokerto	4.12	5.82	5.15
Kabupaten Jombang	3.24	5.37	5.04
Kabupaten Nganjuk	3.61	4.84	5.40
Kabupaten Madiun	3.34	4.32	5.12
Kabupaten Magetan	3.04	3.89	4.47
Kabupaten Ngawi	2.55	3.19	4.49
Kabupaten Bojonegoro	-5.54	-6.16	2.47
Kabupaten Tuban	3.00	8.88	4.36
Kabupaten Lamongan	3.43	5.56	4.28
Kabupaten Gresik	3.79	7.38	4.62
Kabupaten Bangkalan	-2.07	-1.12	1.20
Kabupaten Sampang	0.22	2.31	2.56
Kabupaten Pamekasan	3.41	4.66	4.96
Kabupaten Sumenep	2.61	3.11	5.35
Kota Kediri	2.50	3.95	1.92
Kota Blitar	4.28	5.22	5.29
Kota Malang	4.21	6.32	6.07
Kota Probolinggo	4.06	6.12	6.04
Kota Pasuruan	3.64	6.22	5.65
Kota Mojokerto	3.65	5.56	2.79
Kota Madiun	4.73	5.52	5.80
Kota Surabaya	4.29	6.51	5.70
Kota Batu	4.04	6.18	6.19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2024

Berdasarkan laporan dari BPS tahun 2023 Provinsi Jawa Timur menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Menurut data tersebut terdapat 19 dari 38 kota/kabupaten menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi 2023 dan Kabupaten Bangkalan menjadi yang terendah di Provinsi Jawa Timur sebesar 1,20 persen. PDRB menurut Lapangan Usaha Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 terhadap tahun 2022 (y-on-y) kondisi ini disebabkan pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, namun lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian terkontraksi terdalam sebesar -6,44 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,36 persen, diikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,67 persen, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,02 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha lainnya masih tumbuh di bawah 10 persen.

Teori keagenan (*agency theory*) berusaha menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam interaksi ekonomi atau manajerial yang berfokus pada potensi konflik kepentingan antara keduanya karena agen (pemerintah daerah) mungkin tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan principal (pemerintah pusat). Hal ini bertujuan untuk meminimalkan konflik dan biaya yang muncul dari hubungan antara prinsipal dan agen. Menurut Jensen dan Meckling (1976), jika diberi kesempatan, maka pemerintah daerah akan berperilaku mementingkan diri

sendiri, perilaku yang mungkin bertentangan dengan kepentingan pemerintah pusat.

Pertumbuhan Ekonomi merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan perekonomian suatu daerah dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sundoro, 2021). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat meningkatkan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Ketika semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ini akan meningkatkan sumber penerimaan daerah dan tentu saja akan membuat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin tinggi.

Jika suatu daerah mampu menghasilkan PAD yang tinggi, penerimaan dana perimbangan yang diterima makin menurun karena pemerintah pusat menganggap daerah tersebut lebih mandiri secara fiskal. Menurut Undang-undang Nomor 33 Pasal 1 angka 20 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk pemerataan fiskal pada tiap daerah (Wiraswasta, 2018).

Dengan tujuan tersebut, dana yang diberikan pemerintah pusat pada pemerintah daerah dapat digunakan untuk mendanai pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mempermudah aktivitas kehidupan masyarakat, hal tersebut mempengaruhi pendapatan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kualitas hidup masyarakat meningkatkan jumlah pajak yang diterima dari masyarakat menyebabkan pemerintah daerah dapat mengelola kembali wilayahnya dengan menggunakan pajak tersebut untuk pembangunan ekonomi. Akibatnya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah terjadi secara bertahap-tahap.

Hal ini dibuktikan secara empiris oleh Sinaga *et al.* (2023); Wiraswasta *et al.* (2018); Irvan dan Karmini (2016). Hasilnya mengindikasikan bahwa hubungan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan. Dana Perimbangan secara nyata telah berdampak baik dan mampu memicu pertumbuhan ekonomi. Sementara hasil penelitian Ernita *et al.* (2020) dan Ningsih dan Noviaty (2019) menemukan bahwa dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain dana perimbangan, efisiensi pengelolaan keuangan daerah juga turut menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi (Sinaga *et al.* 2023). Tingginya pendapatan daerah yang dihasilkan menjadi tidak berarti apabila tingkat efisiensi anggaran sangat rendah. Efisiensi anggaran artinya menghindari pemborosan anggaran untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh

sebab itu, dalam merealisasikan pendapatan yang ditargetkan pemerintah daerah perlu memperhatikan prinsip efisiensi. Biaya-biaya untuk merealisasikan suatu pendapatan harus ditekan serendah mungkin. Dengan adanya penghematan anggaran, maka akan tersedia banyak uang yang dapat digunakan untuk membiayai keperluan yang lebih urgent, terutama pembangunan infrastruktur ekonomi. Hal ini ditegaskan oleh penelitian Nurulita *et al.* (2018) bahwa sebagai bagian Kinerja Keuangan Daerah, efisiensi pengelolaan keuangan daerah akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, serapan belanja modal yang rendah akan berpengaruh pada pembangunan yang akibatnya terhambat dan masyarakat dirugikan. Oleh sebab itu, perlu adanya efisiensi dalam mengelola keuangan publik, agar pembangunan publik dapat berjalan dengan lancar. Sementara hasil penelitian Sinaga *et al.* (2023) menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Keuangan daerah yang dikelola secara efisien akan menghasilkan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan penggunaannya, sehingga mampu meningkatkan produktivitas ekonomi daerah. Daerah dengan efisiensi pengelolaan keuangan yang tinggi akan lebih mampu mengarahkannya kepada belanja modal, untuk mendukung sektor-sektor ekonomi yang strategis. Dengan melakukan pengelolaan pengeluaran anggaran yang efisien hal ini dapat membantu pemerintah dalam memfokuskan belanja

pemerintah yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Belanja modal merupakan salah satu bagian dari belanja pemerintah. Belanja modal adalah belanja dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang memenuhi kriteria masa manfaat lebih dari dua belas bulan (Sundoro, 2021). Alokasi belanja modal (*capital expenditure*) dalam konteks anggaran pemerintah daerah adalah dana yang dialokasikan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang. Alokasi belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Wiraswasta *et al.*, 2018). Pembelian aset jangka panjang bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam pelayanan publik atau masyarakat sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat, pada akhirnya meningkatkan PDRB dan pertumbuhan ekonomi ikut meningkat.

Selain sebagai pengeluaran pemerintah, menurut Sinaga *et al.*, (2023) belanja modal juga berfungsi sebagai mediator yang memediasi hubungan antara dana perimbangan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan belanja modal mampu memediasi pengaruh dana perimbangan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Sinaga *et al.*, (2023) dan Wiraswasta *et al.*, (2018) secara tidak langsung dana perimbangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan modal

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui mediasi belanja. Sementara itu, menurut Irvan dan Karmini (2016) dana perimbangan tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pengeluaran pemerintah dengan menggunakan belanja modal seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jaringan yang didalam prosesnya digunakan pada proyek-proyek untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang mempengaruhi kesejahteraan daerah dan masyarakat. Ketika itu terjadi, maka hal tersebut meningkatkan efisiensi ekonomi, daya tarik investasi, dan kualitas hidup masyarakat pada gilirannya pertumbuhan ekonomi lokal ikut meningkat.

Pemilihan Provinsi Jawa Timur sebagai objek penelitian dilatar belakangi oleh perhatian terhadap isu signifikan dalam konteks Pertumbuhan Ekonomi, khususnya terkait melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Dari sumber informasi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas dan fenomena adanya beberapa daerah yang mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, sehingga ditarik judul penelitian “Pengaruh Dana Perimbangan dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Yang dimediasi Belanja Modal”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur melalui Belanja Modal sebagai mediasi?
4. Apakah Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur melalui Belanja Modal sebagai mediasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara empiris adalah untuk menganalisis pengaruh:

1. Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur
2. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

3. Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur melalui Belanja Modal sebagai mediasi
4. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur melalui Belanja Modal sebagai mediasi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan wawasan baru mengenai Pengaruh Dana Perimbangan dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur yang dimediasi Belanja Modal. Secara khusus, harapan dalam penelitian ini agar mampu memberikan kontribusi dan berfungsi sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan:

1. Mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap literatur ilmu akuntansi, khususnya Dana Perimbangan dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan pada sub bidang akuntansi sektor publik.
2. Mampu memberikan kontribusi dan berfungsi sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.